

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Suryana, *Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan dan Energi: Kasus Panas Bumi dan Batubara*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2018
- Ade Kosasih., John Kenedi dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Vanda, Bengkulu, 2017
- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, Deepublish, Sleman, 2023
- Ateng Syarifudin, *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, Pena Media, Bandar Lampung, 2016
- Dudi Hermawan., Santia Ardi Mustofa., L.A. Permata., Winda Nirmala dan Tria Selvi Rustana, *Neraca Sumber Daya Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2022*, Kementrian ESDM, Jakarta, 2022
- Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2011
- N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Erlangga, Surabaya, 1992
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, Univerrsitat Lampung, Bandar Lampung, 2015
- Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Modem English Press, Jakarta, 2016
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, Cendikia Press, Bandung, 2020
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2014
- Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020
- Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2010
- Uno, *Potensi Bahan Galian dan Mitigasi Bencana Alam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, Ubhara Press, Surabaya, 2020

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Zebua, *Dampak Penambangan Bahan Galian C Terhadap Lingkungan Pertanian*, Alfabeta, Bandung, 2016

B. Jurnal

Andy Tonggo Michael Sihombing dan Ricky Banke, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Simantek*, Volume 7, Nomor 1, 2023, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1319/218>

Arsyad., Didi Rukmana., Darmawan Salman dan Ilham Alimuddin, Potensi Ekonomi dan Manfaat Hidrologis Pertambangan Pasir Sungai Sadang di Pinrang Sulawesi Selatan, *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*, Volume 11, Nomor 2, 2020, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jai2/article/view/10374/5382>

Asril, “Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/220433-dampak-pertambangan-galian-c-terhadap-ke.pdf>

Efni Cerya dan Afriva Khaidir, “Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literatur”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Volume 6, Nomor 1, 2021, <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/755/613>

Endang Putri Ayu., Arrie Budhiartie, dan Ivan Fauzani Raharja, Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online di Indonesia, *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 3, 2022

Fachriadi Nandar, Pengawasan Terhadap Kegiatan Pertambangan Batuan Di Kabupaten Bone, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13354/2/B12115025_skripsi_10-01-2022%201-2.pdf

Naufal Daffa ‘Aulia, Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2024, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65778/1/20103070120_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Naurita Pertiwi, Pemetaan Lokasi Tambang Bahan Galian C di Kabupaten Semarang Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), *Thesis*, Universitas Negeri Semarang, 2009

- Noor Wahyuningsih, “Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalan Terhadap Perekonomian Kalimantan Timur”, *Jurnal Riset Inossa*, Volume 1, Nomor 1, 2019, <https://ojs.samarindakota.go.id/index.php/jri/article/view/6>
- Nurul Khoirotul Hijriah dan Fauzi Syam, Dampak Omnibus Law Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Journal of Administration Law*, Volume 5, Nomor 1, 2024, <https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/28813>
- Suherman, D. W., Suiryningtyas, D. T., Multasih, S., Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Lahan dan air Di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Volume 5, Nomor 2, 2015, <http://scholar.unand.ac.id/71289/4/Daftar%20Pustaka.pdf>
- Yoga Surya Ramadhan dan Fitria, Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik Pada Sektor Perizinan, *Journal of Administration Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MWOwYJoAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=MWOwYJoAAAAJ:M3ejUd6NZC8C
- Yuliana, Pengawasan Terhadap Izin Pertambangan Galian Batuan di Kabupaten Luwu Timur, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32066/2/B021171015_skripsi_20-03-2023%20bab%201-3.pdf

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100).

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618).

Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91).

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 44).

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 22)